



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
WONOSOBO



PEMERINTAH
DIGITAL
Birokrasi Berda
DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

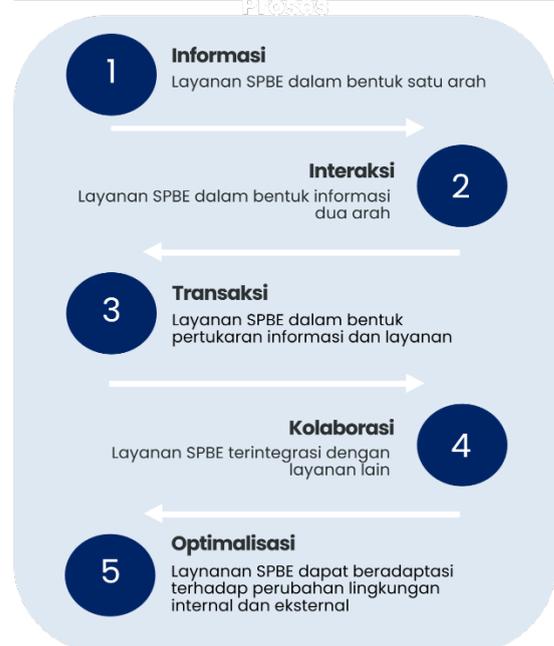
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

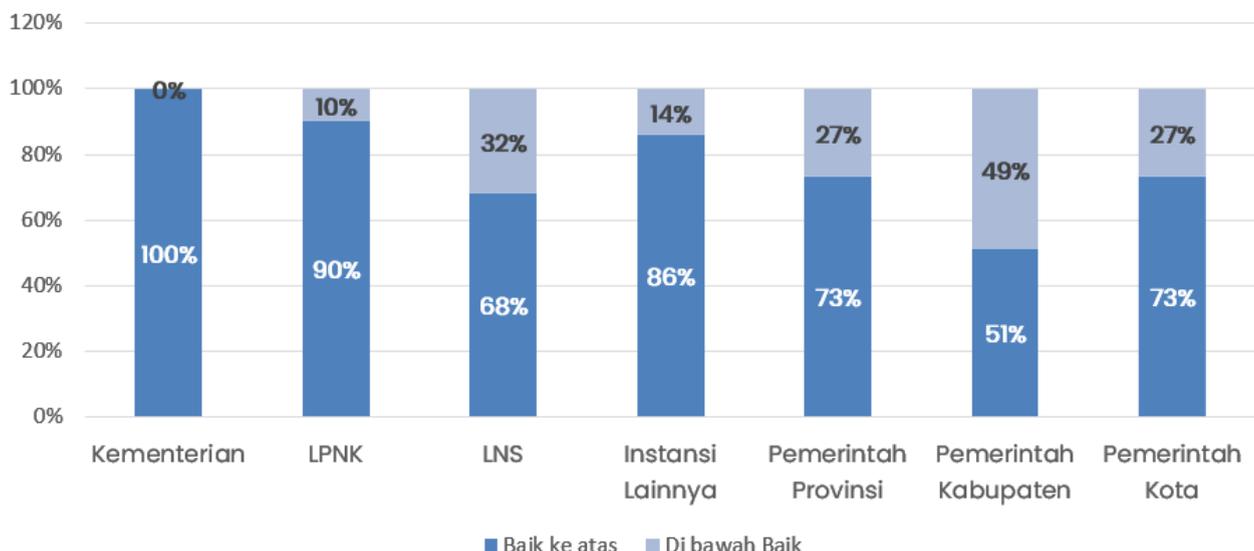


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

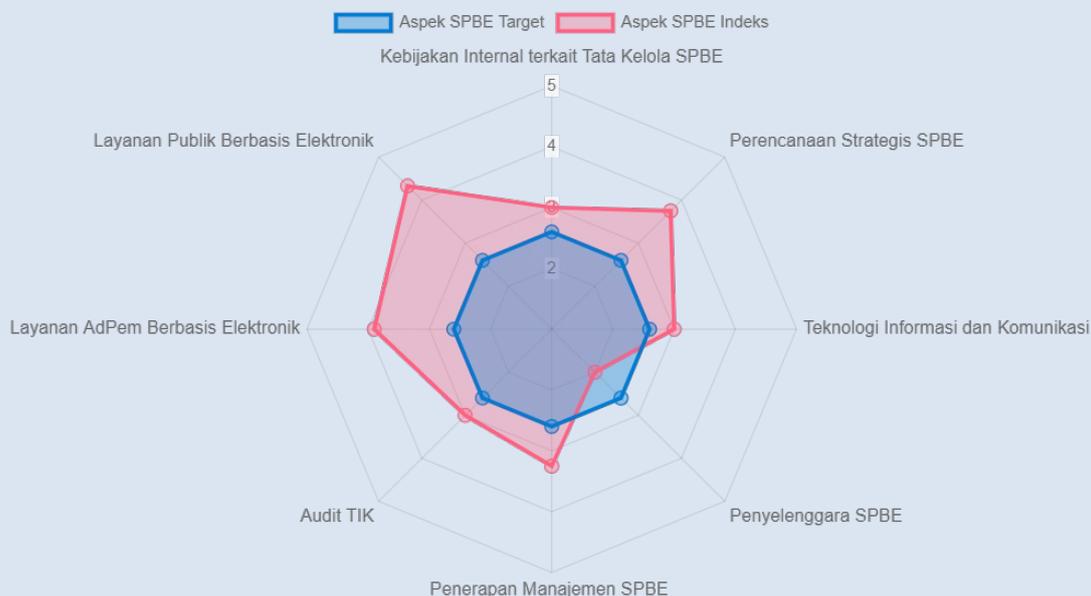
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,54
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
Domain Manajemen SPBE	3,18
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,25
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,07
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,90
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Kebijakan Internal pada indikator Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat pada Kebijakan Internal Manajemen Data yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih belum memiliki Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang mengatur terkait Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan adanya Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Perencanaan Strategis SPBE pada indikator Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Perencanaan Strategis SPBE Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih belum memiliki Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- **Kekuatan**
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih belum melakukan evaluasi dan review secara komprehensif pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Penyelenggara SPBE pada indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya Penyelenggara SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih belum memiliki Penyelenggara SPBE yang mengatur terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE, dimana tidak

ditemukan adanya Penyelenggara SPBE yang mengatur secara komprehensif berdasar bukti dukung yang disampaikan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Penerapan Manajemen SPBE pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dan Penerapan Manajemen Data yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih belum melakukan review dan evaluasi untuk penerapan manajemen lainnya

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Audit TIK pada indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE ,Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE ,Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- Kelemahan
Namun disisi lain, Aspek audit di Kab. Wonosobo yang sudah dilakukan ini belum dilaksanakan oleh auditor eksternal yang telah memiliki sertifikasi auditor keamanan/Sistem Informasi/infrastruktur.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih perlu meningkatkan kapabilitas layanan administrasi berbasis elektronik pada Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kab. Wonosobo adalah dengan adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo
- Kelemahan
Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Kab. Wonosobo tidak memiliki kelemahan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kab. Wonosobo, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kab. Wonosobo adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat pada Kebijakan Internal Manajemen Data yang menjadi unggulan. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat pada indikator Perencanaan Strategis SPBE Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi unggulan. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dapat terlihat pada Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dan Penerapan Manajemen Data yang menjadi unggulan. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai Pegawai yang menjadi unggulan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo. Rata-rata layanan administrasi ini sudah memiliki kapabilitas kolaborasi dan integrasi, dan ada yang sudah dioptimalisasi. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi unggulan dalam penerapan SPBE pada Kab. Wonosobo. Rata-rata layanan publik ini sudah memiliki kapabilitas kolaborasi dan integrasi, dan beberapa sudah dioptimalisasi.

Namun disisi lain, Kab. Wonosobo masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dan Penyelenggara SPBE. Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang masih kurang. Pada Aspek Penyelenggara SPBE Kab. Wonosobo memiliki kelemahan pada indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Indikator Kolaborasi Penerapan SPBE, berdasar data dukung yang disampaikan.

Pada Aspek Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Kab. Wonosobo, dan yang sudah memiliki kematangan kolaborasi dan diintegrasikan, perlu untuk dilakukan optimalisasi. Diharapkan dapat melakukan inisiatif perbaikan pada aspek-aspek Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dan Penyelenggara SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5